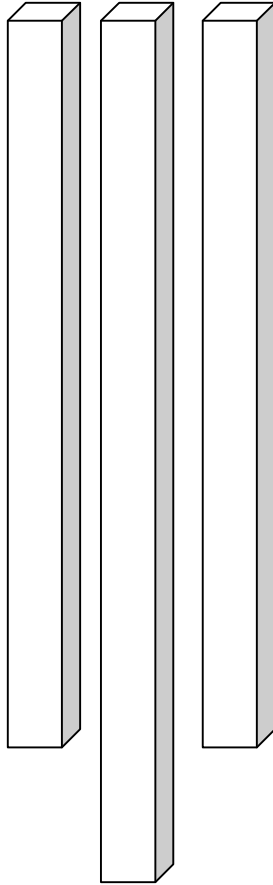


RENJA 2018



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Semeru Nomor 40 Blitar
Telp/fax 0342-805022 email: satpolpp@blitarkab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata pengantar	
Daftar Isi	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	11
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	15
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2018. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 memuat Program/ kegiatan tahun 2018, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021;
 19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
 20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja-OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategik) Satuan Polisi Pamong Praja.

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB. IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2016 terdiri dari 8 (delapan) program dan 15 (lima belas) kegiatan, adalah sebagai berikut. :

A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan target kinerja sebesar 160 set dengan capaian kinerja sebesar 100%, Kegiatan Operasi Penertiban PNS dan Pelajar dengan target kinerja sebesar 50 kali dengan capaian kinerja sebesar 50 kali
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target kinerja sebesar 69 orang dengan capaian kinerja sebesar 69 orang (100%), Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja sebesar 50 orang dengan capaian kinerja sebesar 50 orang (100%), Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore dengan target kinerja sebesar 2 kali dengan capaian kinerja sebesar 2 kali (100%), Pendidikan dan Pelatihan Non Formal dengan target kinerja sebesar 30 orang dengan capaian kinerja sebesar 30 orang (100%)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan target kinerja 7 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 8 dokumen (114%)

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui Kegiatan Pengamanan Wilayah dengan target 250 kali dengan capaian kinerja sebesar 635 kali (254%), Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah target sebesar 35 kali dengan capaian kinerja sebesar 99 kali (283%), Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda target sebesar 10 kali dengan capaian kinerja sebesar 10 kali (100%).
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan lingkungan di masyarakat target sebesar 2 kali dengan capaian kinerja sebesar 2 kali (100%), Kegiatan Penguatan Kinerja Linmas dalam rangka Peningkatan kemampuan dan keterampilan
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) melalui Kegiatan Penyuluhan, Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba target sebesar 2 kali dengan capaian kinerja sebesar 2 kali (100%)

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2017

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
			Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan penyediaan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100%	100%	100%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100,00 persen	100 persen	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	7 Paket	7 Paket	100%	100%	8 r4, 27 r2, 16 printer, 15 pc/lptop, 7 AC, alat keamanan, mebel	

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur yang disiplin	100 persen	90 persen	90%	100%	100%	100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	160 Set	158 set		160 set	160 set	100%
	Operasi Penertiban PNS dan Pelajar	Jumlah operasi penertiban PNS dan Pelajar	50 Kali	95 kali	190%	0	0	0
	Pengadaan pakaian Khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	0	0	160 set	160 set	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	100 persen	100 persen	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat formal	69 orang	69 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Anggota Satpol PP yang ikut Bimtek	50 orang	50 Orang	100%	70 orang	70 orang	100%
	Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore	Jumlah pelaksanaan HUT dan Jambore Satpol PP	2 Kali	2 kali	100%	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Non formal	30 orang	0 orang	0	0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	0	0	0	70 orang	70 orang	100%

		peningkatan sumberdaya aparatur							
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	100 persen	100 persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	7 dokumen	8 dokumen	114%	0	0	0	0
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	0	0	0	10 dokumen	10 dokumen	100%	
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah	95 persen	254 persen	267%	95%	95%	95%	95%
	Kegiatan Pengamanan Wilayah	Jumlah Pengamanan Wilayah	250 kali	635 Kali	254%	0	0	0	0
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terkendalinya keamanan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	0	0	0	22 kec.	22 kec.	95%	
	Penyusunan Ranperda	Jumlah dokumen ranperda yang disusun	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah penyelenggaraan penegakan dan penindakan pelanggaran	35 kali	99 Kali	282%	180 hari	180 hari	95%	

		perda						
	Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda	Jumlah Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda	8 kali	10 kali	100%	8 kali	8 kali	95%
7	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100 persen	100 persen	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di wilayah	2 kali	2 kali	100%	22 kec	22 kec.	100%
	Kegiatan Penguatan kinerja Linmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase kasus Pekat yang ditangani	95 persen	90 persen	90%	95%	95%	95%
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran/penggunaan Miras	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengamanan Wilayah
 - b. Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Penguatan Kinerja Linmas dalam rangka Peningkatan kemampuan dan keterampilan

Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar

N O	Indikator	SPM/ standar nasion al	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	STANDART IKK (PP-6/2008)											
A.	Aspek Pelayanan Umum											
1.	Pelayanan Penunjang - Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban Masyarakat											
	a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		2 : 10.0 00	2 : 10.00 0	2 : 10.00 0	2 : 10.0 00	2 : 10.00 0	1	1	50%	-	
	b) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		60 org/ 10.0 00					65	65	100 %	-	
	c) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		1 pos/ pos/	1 pos/ RW	1 pos/	1 pos/	1 pos/ RW	0,31	0,31	31%	-	data tiap kecamatan

N O	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			RW		RW	RW						n belum lengkap
II.	SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI NO. 69 TAHUN 2012)											
A.	Pelayanan Dasar Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat											
	d) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	100 %		90%	90%	95%	95%	100 %	100%	100 %	-	
	e) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3x sehar i		3x	3x	3x	3x	3x	2x	66%	-	
	f) Cakupan rasio petugas	1						1,06	2	100	-	

N O	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab/Kota	orang tiap RT								%		

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar adalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
5. Adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif mau pun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA. Pada tataran implementasi tidak jarang Perda juga belum dibuatkan SK oleh Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan PERDA. Di Kabupaten Blitar belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan PKL, penanganan Anak Jalanan/Gepeng serta Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penambangan Pasir.

6. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu,
sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema. Misal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.
7. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- 4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2017, program indikatif di tahun 2018 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 maka Tema RKPD Tahun

2018 adalah “Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung peningkatan infrastruktur.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 8 program yang terdiri dari 33 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2018 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Kebutuhan Dana	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Blitar	<i>Persentase Kepuasan Aparatur</i>	100%	829,500,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Blitar	<i>Persentase Kepuasan Aparatur</i>	100%	829,500,000	
	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi		Jumlah Jenis layanan administrasi perkantoran	100%	829,500,000	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi		Jumlah Jenis layanan administrasi perkantoran	100%	829,500,000	
2	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab Blitar	<i>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu</i>	100%	27,000,000	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab Blitar	<i>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu</i>	100%	27,000,000	

	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja		Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 dokumen	14,000,000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja		Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 dokumen	14,000,000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Kab Blitar	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan keuangan	6 dokumen	13,000,000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Kab Blitar	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan keuangan	6 dokumen	13,000,000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<i>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</i>	100%	3,000,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<i>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</i>	100%	3,000,000,000	
	Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pol PP dan PPNS	Kab Blitar	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik	11 r4, 27 r2, 16 printer, 15 pc/lptop, 7 AC, alat keamanan, mebeler,	3,000,000,000	Kegiatan Penyediaan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pol PP dan PPNS	Kab Blitar	Jumlah Sarpras yang berfungsi baik	11 r4, 27 r2, 16 printer, 15 pc/lptop, 7 AC, alat keamanan, mebeler,	3,000,000,000	

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	798,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	798,000,000	
	Kegiatan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pol PP dan PPNS		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bintek	70 org	798,000,000	Kegiatan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pol PP dan PPNS		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bintek	70 org	798,000,000	
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab Blitar	Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah	95%	711,750,000	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab Blitar	Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah	95%	711,750,000	
	Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah		Prosentase kasus yang diselesaikan	60%	258,500,000	Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah		Prosentase kasus yang diselesaikan	60%	258,500,000	
	Kegiatan Perumusan kebijakan terkait katrantibmas		Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	1 Dokumen	225,000,000	Kegiatan Perumusan kebijakan terkait katrantibmas		Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	1 Dokumen	225,000,000	

	Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda		Jumlah Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda	12 Kali	131,250,000	Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda		Jumlah Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda	12 Kali	131,250,000
	Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Pol PP		Jumlah Pembinaan Disiplin Aparatur Pol PP	10 kali	50,000,000	Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Pol PP		Jumlah Pembinaan Disiplin Aparatur Pol PP	10 kali	50,000,000
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras	Kab Blitar	Jumlah peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras	70 org	25,000,000	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras	Kab Blitar	Jumlah peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras	70 org	25,000,000
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi		Jumlah Peserta Penyuluhan Tentang Prostitusi	50 org	22,000,000	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi		Jumlah Peserta Penyuluhan Tentang Prostitusi	50 org	22,000,000
6	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	95%	942,984,000	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	95%	942,984,000

	Kegiatan Patroli Wilayah Trantibum		Jumlah Patroli Trantibum	525 kali	396,984,000	Kegiatan Patroli Wilayah Trantibum		Jumlah Patroli Trantibum	525 kali	396,984,000	
	Kegiatan Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah, orang-orang penting dan masyarakat		Jumlah Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah, orang-orang penting dan masyarakat	120 Kali	435,750,000	Kegiatan Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah, orang-orang penting dan masyarakat		Jumlah Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah, orang-orang penting dan masyarakat	120 Kali	435,750,000	
	Kegiatan Operasi Penertiban PNS dan Pelajar		Jumlah operasi penertiban PNS dan Pelajar	60 kali	57,750,000	Kegiatan Operasi Penertiban PNS dan Pelajar		Jumlah operasi penertiban PNS dan Pelajar	60 kali	57,750,000	
	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaporan trantibum	Kab Blitar	Jumlah laporan monev trantibum	12 Dokumen	52,500,000	Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaporan trantibum	Kab Blitar	Jumlah laporan monev trantibum	12 Dokumen	52,500,000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Prosentase pos kamling siaga	100%	715,625,000	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Prosentase pos kamling siaga	100%	715,625,000	
	Kegiatan Penguatan kinerja Satlinmas dan Jambore Satlinmas		Jumlah peserta Pelatihan dan jambore	416 orang	345,625,000	Kegiatan Penguatan kinerja Satlinmas dan Jambore Satlinmas		Jumlah peserta Pelatihan dan jambore	416 orang	345,625,000	

Kegiatan Pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan		Jumlah peserta Pam swakarsa yang dilatih	100 orang	170,000,000	Kegiatan Pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan		Jumlah peserta Pam swakarsa yang dilatih	100 orang	170,000,000	
Kegiatan Fasilitas Pengamanan Pemilu		Jumlah pelaksanaan Pemilukada yang difasilitasi pengamanannya	2 kali putaran	200,000,000	Kegiatan Fasilitas Pengamanan Pemilu		Jumlah pelaksanaan Pemilukada yang difasilitasi pengamanannya	2 kali putaran	200,000,000	
Program peningkatan Kesigaaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran		<i>Prosentasi kejadian kebakaran yang tertangani</i>	65%	852,400,000	Program peningkatan Kesigaaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran		<i>Prosentasi kejadian kebakaran yang tertangani</i>	65%	852,400,000	
Kegiatan Pelayanan dan Pencegahan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran		Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani	15 kali	772,400,000	Kegiatan Pelayanan dan Pencegahan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran		Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani	15 kali	772,400,000	
Kegiatan Peningkatan Kapasitas petugas pemadam Kebakaran		Jumlah anggota damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	66 orang	80,000,000	Kegiatan Peningkatan Kapasitas petugas pemadam Kebakaran		Jumlah anggota damkar yang ditingkatkan kapasitasnya	66 orang	80,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Bab III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sehingga sesuai dengan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang diterget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Satpol PP Kab. Blitar	Sasaran pada Renstra Satpol PP Prov. Jatim
1	2	3	4
Bidang Urusan : Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat			
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,6	Meningkatkan peran satlinmas dalam meminimalisir dampak bencana dan pam swakarsa
2.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	71	
	Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten (org/RT)	1	
3.	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,31 /RT	Menegakkan supremasi hokum peraturan daerah
4.	Cakupan Penegakan Perda	95%	
5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketetraman, keindahan) di kabupaten	95%	
6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali/hari)	2	
7.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,6	Masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib tenteram dan kondusif

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

- Menegakan Peraturan dan Perundang-undangan
- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- Memberikan Pelayanan prima dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dari bahaya kebakaran

2. Sasaran

- Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya secara optimal
- Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Adanya rasa aman pada masyarakat dari bahaya kebakaran

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2018 terdiri dari :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis layanan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran : Kebutuhan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Pendanaan : APBD

b. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Indicator kinerja : Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja

Kelompok sasaran : Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Pendanaan : APBD

2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan

Indikator kinerja : Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan keuangan

Kelompok sasaran : Dokumen Perencanaan dan Pelaporan keuangan

Pendanaan : APBD

c. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pol PP dan PPNS

Indikator Kinerja : Jumlah Sarpras yang berfungsi baik

Kelompok Sasaran : Pengadaan, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pokok program ini adalah :

3. Kegiatan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pol PP dan PPNS

Indikator Kinerja : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bintek

Kelompok Sasaran : Anggota Satpol PP

e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

1. Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

Indikator kinerja : Jumlah penyelenggaraan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

Kelompok sasaran : Masyarakat Kabupaten Blitar

2. Kegiatan Perumusan kebijakan terkait katrantibmas

Indikator kinerja : Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun

Kelompok sasaran : Perda dan kebijakan

3. Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

Indicator kinerja : Jumlah Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

Kelompok sasaran : Pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

4. Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Pol PP

Indicator kinerja : Jumlah Pembinaan Disiplin Aparatur Pol PP

Kelompok sasaran : Aparatur Pol PP Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

5. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras

Indicator kinerja : Jumlah peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras

Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar

6. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Indicator kinerja : Jumlah Peserta Penyuluhan Tentang Prostitusi

Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan :

1. Patroli Wilayah Trantibum

Indikator kinerja : Jumlah Patroli Trantibum

Kelompok sasaran : wilayah Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

2. Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah, orang-orang penting dan masyarakat

Indicator kinerja : Jumlah Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah, orang-orang penting dan masyarakat

Kelompok sasaran : Pimpinan Daerah, orang-orang penting dan masyarakat

3. Operasi Penertiban PNS dan Pelajar

Indicator kinerja : Jumlah operasi penertiban PNS dan Pelajar

Kelompok sasaran : PNS dan Pelajar

4. Monitoring dan evaluasi pelaporan trantibum

Indicator kinerja : Jumlah laporan monev trantibum

Kelompok sasaran : Kasi Trantib di wilayah Kecamatan se Kab. Blitar

Pendanaan : APBD

g. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kegiatan :

1. Penguatan kinerja Satlinmas dan Jambore Satlinmas

Indicator kinerja : Jumlah peserta Pelatihan dan Jambore

Kelompok sasaran : anggota Linmas di wilayah

2. Pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan

Indicator kinerja : Jumlah peserta Pam swakarsa yang dilatih

Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar

3. Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Pemilu

Indicator kinerja : Jumlah pelaksanaan Pemilukada yang difasilitasi pengamanannya

Kelompok sasaran : wilayah Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

h. Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran

Kegiatan :

1. Pelayanan dan Pencegahan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Indicator kinerja : Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani

Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas petugas pemadam kebakaran.

Indicator kinerja : Jumlah anggota damkar yang ditingkatkan kapasitasnya

Kelompok sasaran : Anggota Pemadam Kebakaran dan masyarakat

Pendanaan : APBD

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2018 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2018 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2018.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Blitar, 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BLITAR**

SUYANTO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590930 198603 1 008